

**LAPORAN AKHIR PROGRAM
IPTEKS BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT
(IbDM)**



***SMART VILLAGE* SEBAGAI UPAYA PENGUTAN KAPASITAS
PEMERINTAHAN NAGARI**

OLEH:

Kusdarini, S.IP.,M.PA.	(Ketua)	NIDN: 0025087311
Dr. Desna Aromatica, S.AP,M.AP	(Anggota)	NIDN: 0016128101
Dr. Hendri Koeswara,M.Soc,sc	(Anggota)	NIDN: 0001047902
Dr. Ria Ariany, M.Si	(Anggota)	NIDN: 0013027307
M. Ichsan Kabullah, S.IP., M.PA	(Anggota)	NIDN: 0004098501
Misnar Sitriwanti, S.AP.,M.Si	(Anggota)	NIDN: 1020088501
Engdila Putri	(Anggota)	BP : 1710842021
Riki Tanjung	(Anggota)	BP : 1810843024

Dengan Perjanjian Kontrak no : T/72/UN.16.17/PM.IbDM/ LPPM/2019

**UNIVERSITAS ANDALAS
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT IbDM

1. Judul IbDM : *Smart Village* sebagai upaya penguatan kapasitas Pemerintahan Nagari
2. Nama Mitra (1) : Pemerintah Nagari Koto Baru
Nama Mitra (2) : Pemerintah Nagari Salayo
3. Ketua Tim Pengusul
a. Nama : Kusdarini, S.IP.M.PA
b. NIDN : 0025087311
c. Jabatan/golongan : Penata / III C
d. Program Studi : Administrasi Publik
e. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
f. Alamat Kantor : Jurusan Administrasi Publik FISIP Unand Limau Manih.
4. Anggota Tim Pengusul
a. Jumlah anggota : 6 orang
b. Nama Anggota tim : Dr.Desna Aromatica,S.AP.,M.AP
Dr.Hendri Koeswara, S.IP.,M.Soc
Dr. Ria Ariany, M.Si
M.Ichsan Kabullah, S.IP.,M.PA
Misnar Sitriwanti, S.AP.,M.Si
Riki Tanjung
5. Lokasi Kegiatan Mitra (1)
a. Wilayah Mitra : Nagari Koto Baru Kec.Kubung Kab.Solok
b. Jarak PT ke lokasi mitra : 72 Km
6. Lokasi Kegiatan Mitra (2)
a. Wilayah Mitra : Nagari Salayo Kec.Kubung Kab.Solok
b. Jarak PT ke lokasi mitra : 75 km
7. Bentuk Kegiatan : Sosialisasi dan Merancang model
8. Biaya : Rp.10,000,000,-(Sepuluh Juta Rupiah)
9. Luara yang dihasilkan : Modul *Smart Village*, Laporan kegiatan, dan Jasa
10. Waktu pelaksanaan : 2 bulan

Padang, 4 Oktober 2019

Ketua Tim



Kusdarini S.IP,M.PA

NIP. 197308252001122001



Mengetahui
Dekan
Fisip Univ. Andalas

Dr. Alfian Miko, MS
NIP. 196206211988111 001

Menyetujui
Ketua LPPM Unand

Dr. Ing. Uyung Gatot S.Dinata,MT

NIP.196607091992031003

RINGKASAN

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nagari sebagai pemerintahan terdepan di wilayah Kabupaten Solok yang telah diterapkan sejak tahun 2001 terus diselenggarakan. Data terakhir dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten per tahun 2018 hanya ada 3 Nagari Maju yang dinaungi oleh 16 kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar hanya berbicara tentang pengelolaan Dana Desa. Keberadaan Pemerintahan Nagari yang salah satunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dari data BPS Provinsi Sumatera Barat seperti untuk tahun 2015 dan 2016 masih belum tercapai. Salah satunya persoalan kemiskinan. Data BPS 2015 angka kemiskinan Kab.solok mencapai 9,04% berada diatas angka kemiskinan provinsi sebesar 6,71%, bahkan di tahun 2016 angka kemiskinan dikabupaten ini mencapai 10% (dari jumlah penduduk sebesar 363.684 jiwa) dimana kemiskinan ini disebabkan oleh kemiskinan pangan. Meskipun pada tahun 2017 angka kemiskinan menurun, namun kemiskinan tetap tinggi. Selain kemiskinan yang masih cukup tinggi, kabupaten pertama yang bernagari di Sumatera Barat ini, berdasarkan keputusan menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI nomor 030 tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian desa hanya ada 3 nagari yang terkategori nagari maju.

Untuk itu kegiatan pengabdian ini bertujuan mengenalkan konsep inovatif dalam mengelola pemerintahan nagari sehingga menghasilkan modul yang dapat menjadi *blue print* sebuah acuan penyelenggaraan pemerintahan berkonsep *smart village*. Dua Nagari berdekatan ini dapat saling menopang dan menjadi pionir bagi nagari lain, khususnya nagari maju untuk naik pada level Desa atau Nagari dengan indeks desa mandiri. Kegiata ini akan meliputi beberapa hal yaitu 1), pengenalan konsep *smart rural*. 2) identifikasi dimensi-dimensi *smart rural* yang sudah berkembang dan yang perlu dikembangkan. 3) merumuskan model *smart rural* berbasis karakteristik masing-masing Nagari.

Pada akhirnya kegiatan pengabdian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah modul pengembangan *smart rural* yang dapat menjadi pedoman/*blue print* bagi pengembangan Nagari Salayo dan Nagari Koto Baru.

Kata kunci: *smart village*, kapasitas, pemerintah nagari

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1 Judul Pengabdian : *Smart village* Sebagai Upaya penguatan Kapasitas Kepada Masyarakat Pemerintah Nagari

2 Tim Pelaksana :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Kusdarini, S.IP., MPA	Ketua	Kebijakan Publik	FISIP	10 jam/minggu
2	Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP	Anggota	Manajemen Publik	FISIP	5 jam/minggu
3	Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.	Anggota	Kebijakan Publik	FISIP	5 jam/minggu
4	Dr. Ria Ariany, M.Si	Anggota	Manajemen Publik	FISIP	5 jam/minggu
5	Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA	Anggota	Administrasi Pembangunan	FISIP	5 jam/minggu
6	Misnar Sitriwanti, S.AP.,M.Si	Anggota	Kebijakan Publik	FISIP	5 jam/minggu
7	Riki Tanjung	Anggota		FISIP	5 jam/minggu

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: Pemerintah Nagari Koto Baru dan Pemerintah Nagari Salayo yaitu Wali Nagari dengan perangkat Nagari dan Anggota Badan Musyawarah Nagari

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Oktober Tahun 2019

Berakhir : Bulan Desember Tahun 2019

5. Usulan Biaya BOPTN Universitas Andalas: Rp. 10.000.000

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat: Nagari Koto Baru dan Nagari Salayo Kec.Kubung Kabupaten Solok

7. Mitra yang terlibat: Wali Nagari dan Perangkat Nagari selaku pemerintah Nagari yang akan menerapkan model *Smart village* beserta Badan Musyawarah Nagari selaku mitra pemerintah nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang mengawasi jalannya *Smart village* di Nagari

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan

Perolehan indeks desa membangun (IDM) pada Nagari Koto Baru dan Nagari Salayo yang telah sampai pada level maju beberapa tahun berturut-turut perlu ditingkatkan pada level mandiri. Pada level maju mereka memiliki kehidupan sosial yang baik, pendidikan yang baik dan lingkungan yang baik tapi tidak memiliki kemandirian dalam membiayai penyelenggaraan kehidupan pemerintahan. Nagari Mandiri yaitu nagari yang mampu mensejahterakan masyarakatnya dan menyelenggarakan pemerintahan bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Untuk itu perlu sebuah konsep model *smart village* sebagai referensi bagi Nagari Koto Baru dan Nagari salayo dalam mewujudkan indeks desa

mandiri. kemandirian Perlu berbagai terobosan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nagari bersama mitranya Badan Musyawarah Nagari untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mandiri dan inovatif. Konsep *Smart village* adalah model pengelolaan Pemerintahan yang menjadikan desa mandiri. Konsep ini masih belum banyak dikenal di Nagari karena biasanya diterapkan di level pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Namun konsep ini bisa diadopsi di Nagari ditengah minimnya gagasan Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan pemerintahan Nagari.

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran

Digulirkannya dana desa menuntut tumbuhnya inovasi dari desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa. Capaian Nagari maju di kabupaten Solok tercatat dari tahun 2016 hingga data 2017 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab.Solok hanya ada 3 Nagari dari 74 jumlah nagari. Hal ini menunjukkan upaya untuk naik pada level mandiri pun masih akan membutuhkan berbagai terobosan dan kebaharuan ide yang sangat besar dalam mengelola pemerintahan. Pengenalan melalui sosialisasi dan merancang model *smart village* pada pemerintahan Nagari Salayo dan Koto baru diharapkan dapat meningkatkan inovasi mereka dalam mengelola pemerintahan. Dua Nagari maju ini adalah Nagari yang berdekatan hingga pengenalan konsep *smart village* akan bisa nantinya dikembangkan menjadi *smart rural*. Pengenalan konsep model *smart rural* akan menjadi refensi bagi kedua Nagari ini untuk naik kelevel indeks desa mandiri.

10. Rencana luaran

Modul penerapan *smart village* dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis karakteristik dan potensi masing2 nagari serta Jasa dan Laporan Kegiatan Pelatihan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999, hingga Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah menguatkan kedudukan Pemerintahan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan di daerah. Melalui Undang-Undang tersebut penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa diseluruh Indonesia dihapus, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak asal-usul dan adat-istiadat yang masih hidup dalam masyarakat Desa. Hal ini juga didasarkan pada harapan bahwa desa-desa akan berkembang mandiri dan sejahtera dengan caranya sendiri-sendiri sesuai kelokalitasannya.

Sumatera Barat adalah Propinsi yang sebelum diberlakukannya Pemerintahan Desa dan Kelurahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa, telah memiliki Pemerintahan terdepan yaitu Pemerintahan Nagari. Penghapusan penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa oleh Undang-Undang, menjadi momentum penyelenggaraan kembali Pemerintahan Nagari. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, dan direvisi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 2 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

Negara melalui regulasinya mendesain Pemerintahan Nagari dengan model *Hybrid organization*, yaitu percampuran antara *self governing community* terkait otonomi yang dimilikinya, dengan *local self government*, terkait kedudukannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa. Kabupaten Solok adalah Kabupaten pertama yang menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melalui Perda Kabupaten Solok nomor 4 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Komitmen terus berpemerintahan Nagari terlihat dari salah satu misi Pemerintah Kabupaten Solok dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021, yaitu memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan misi ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatkan fasilitasi terhadap Pemerintahan Nagari dan kelembagaan Nagari, dengan strategi dan arah kebijakan adalah pelaksanaan fasilitasi dengan peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Nagari.

Lembaga yang kuat akan membantu Pemerintah Nagari melaksanakan dan mencapai hasil maksimal, dalam tugas-tugas pembangunan yang dibebankan pada Nagari, yang tertuang dalam RPJM Nagari yang telah dirumuskan bersama masyarakat Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. Menurut Antlov (2016), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah membuat Nagari memiliki ruang untuk membuat rencana pembangunan sendiri (*one village one plan*). Hal ini akan mendorong Nagari menjadi Nagari yang mandiri dan mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Sepanjang 18 tahun telah menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018, keberadaan Pemerintahan Nagari yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat masih belum tercapai. Salah satunya persoalan kemiskinan. Data BPS 2015 angka kemiskinan Kabupaten Solok mencapai 9,04% berada diatas angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,71%, bahkan di tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten Solok mencapai 10% (dari jumlah penduduk sebesar 363.684 jiwa) dimana kemiskinan ini disebabkan oleh kemiskinan pangan. Berdasarkan keputusan menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI nomor 030 tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian desa, hanya ada 3 nagari yang terkategori nagari maju (4,1%), 36 Nagari berkembang (48,6%), 29 Nagari tertinggal (39,2%) dan 6 Nagari sangat tertinggal (8,1%). Status kemandirian Desa ini menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, menyatakan bahwa indeks ini ditentukan dari tiga (3) ukuran. Pertama adalah Indeks ketahanan sosial yang terdiri dari modal sosial, kesehatan, pendidikan dan pemukiman. Kedua adalah indeks ketahanan ekonomi yang dilihat dari dimensi ekonomi. Ketiga Indeks ketahanan lingkungan yang terdiri dari dimensi ekologi.

Meskipun angka kemiskinan tinggi, namun masih ada Nagari maju yang dapat diberikan perhatian untuk mengembangkan pemerintahannya agar bergeser dari nagari maju ke nagari mandiri. Hal ini sesuai dengan tujuan UU no 6 tahun 2014 dimana penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai hak asal-usulnya diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Desa dan masyarakatnya. *Smart village* yang akan dikenalkan pada Nagari Koto Baru dan Nagari Salayo adalah bentuk bantuan referensi bagi Nagari-nagari maju ini untuk terus mengembangkan diri ditengah minimnya inovasi yang digagas pemerintah daerah. Maka sebagai akademisi

administrasi publik konsep yang biasa diterapkan dipada pemerintah daerah dan Kota ini dapat diadopsi di Nagari.

1.2 Permasalahan Mitra

Nagari Salayo dan Nagari koto Baru berada pada satu kecamatan yaitu kecamatan Kubung. Uniknya, letaknya yang berbatasan sama-sama berada pada level indeks desa membangun pada tahap atau level desa atau nagari yang maju. Artinya ada satu level lagi yang harus dicapai agar amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu menjadikan Desa di Indonesia mandiri dan masyarakatnya sejahtera perlu dicapai. Sayangnya untuk naik kelevel mandiri, Nagari ini tidak memiliki banyak referensi konsep dan pengalaman ditambah minimnya inovasi yang digagas pemerintah Kabupaten dalam upaya menjadi desa yang mandiri. Selama tahun 2016 hingga ke 2018 saja, hanya ada kurang lebih 11 kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Kebijakan yang dihasilkan juga hanya terkait persoalan asset dan teknis pengelolaan dana desa.

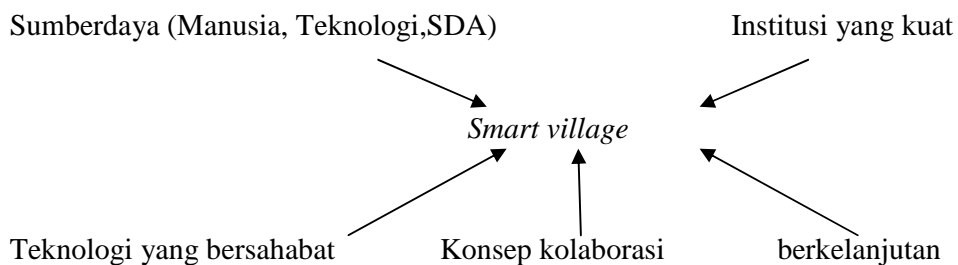
Kondisi ini kami yakini menjadi salah satu penyebab tidak kunjung naiknya level indeks membangun Nagari dari maju menjadi mandiri. Sebagai akademisi administrasi publik, pengenalan konsep model *smart village*, kami yakini dapat menjadi referensi penting bagi Pemerintah Nagari Koto Baru dan Nagari Salayo untuk terus berbenah mencapai level indeks desa membangun mandiri.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Berdasarkan permasalahan dan analisis situasi yang dihadapi mitra, akan diadakan beberapa kegiatan diantaranya adalah :

1. Pengenalan konsep *smart village* kepada Nagari Salayo dan Nagari Koto Baru. Merujuk pada konsep *smart city* oleh Giffiner et al (2007) bahwa *smart village* dalam konsep pengabdian ini adalah sebuah nagari yang terdepan ekonominya, sumberdaya manusiannya, pemerintahannya, mobilitas masyarakat dalam nagari, lingkungan, dan kehidupan masyarakatnya. Menurut Supangkat (2017), desa cerdas dapat diterapkan di Indonesia selama ada komunitas yang harus dilayani.
2. Identifikasi bersama Pemerintah Nagari dimensi-dimensi *smart rural* yang sudah ada dan berkembang dengan yang belum tergalai dan belum dikembangkan. Identifikasi ini dilakukan untuk menentukan model *smart rural* masing-masing nagari. Menurut Ramachandra et al (2015), bahwa Desa yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain (mandiri) dan memberdayakan masyarakatnya.
3. Merumuskan sebuah model *smart rural* berbasis karakteristik masing-masing Nagari yang kemudian dijadikan luaran berupa modul sebagai pedoman pengembangan *smart rural* di Nagari oleh Pemerintah Nagari.



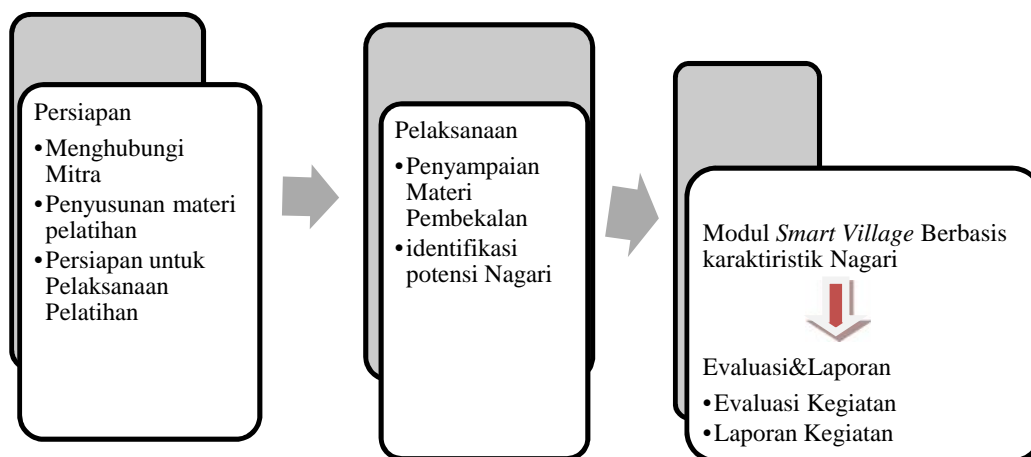
Tabel 1
Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	
2	Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat	
3	Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang	
4	Modul	

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu: pertama, persiapan. Tahap persiapan meliputi: 1) administrasi; 2) koordinasi dengan pihak khalayak sasaran (Pemerintah Nagari Salayo dan Nagari Koto baru), Badan Musyawarah Nagari Salayo dan Koto Baru. 3) Penyiapan materi kegiatan pengabdian; 4) Persiapan narasumber; 5) Penyiapan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan 5) *Checking* terakhir. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sosialisasi/pengenalan dengan judul: *Smart village* Sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintah Nagari. dengan khalayak sasaran adalah Pemerintah Nagari Koto Baru dan Nagari Salayo yang meliputi Wali Nagari dan perangkat Nagari, termasuk Badan Musyawarah Nagari.

Bagan 1 Pelaksanaan Kegiatan



BAB 4

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Dalam berbagai kegiatan pengabdian dan sinergi dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdayaan, LPPM Universitas Andalas berupaya terus mengawal kualitas pengabdian kepada masyarakat di Unand. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Unand diarahkan untuk:

- a. Menerapkan IPTEK yang dikuasai Unand,
- b. Hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian Unand,
- c. Dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha,
- d. Mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan nasional.

Seiring dengan hal tersebut, Program Studi Administrasi Publik juga konsen terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat yang membutuhkan sumbangsih dari aspek keilmuan Administrasi Publik. Roadmap penelitian dan pengabdian Program Studi Administrasi Publik, Fisip Universitas Andalas didasarkan pada Visi dan Misi Universitas, Fakultas, dan Jurusan di bidang penelitian. Visi Universitas Andalas adalah "menjadi Universitas terkemuka dan bermartabat", dan misi Universitas Andalas di bidang penelitian adalah 1) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI; 2) Mendarmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat; Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 3) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Dalam konteks inilah relevansi dilaksanakannya Pelatihan Penguatan Peran BPRN dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 tersebut.

Sedangkan visi dan misi FISIP adalah "menjadi fakultas yang terkemuka dan bermartabat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengkajian sosial budaya dalam merespon globalisasi". Sementara misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di bidang penelitian adalah menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi; Sejalan dengan visi dan misi Univrsitas dan Fakultas, visi

Program Studi Administrasi Publik, Fisip Universitas Andalas adalah ”Menjadi Program Studi Administrasi Publik yang unggul dan bermartabat dalam merencanakan, menyusun, menganalisis, mengadvokasi kebijakan, dan manajemen sektor publik pada isu *collaborative governance* berbasis kearifan lokal di regional Sumatera pada Tahun 2023” dan salah satu misi Program Studi Administrasi Publik, Fisip Universitas Andalas di bidang penelitian dan pengabdian adalah mengembangkan penelitian bidang kebijakan publik dan manajemen sektor publik pada isu *collaborative governance* berbasis kearifan lokal, dalam konteks ini sangat sesuai dengan melakukan pelatihan tentang *Smart village* dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari. Adapun kepakaran dan uraian tugas adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 2
Kepakaran Tim dan Uraian Tugas

No	Nama	Jabatan	Bidang Kepakaran	Tugas
1	Kusdarini, S.IP., MPA	Ketua	Kebijakan Publik	Menyusun proprosal pengabdian kepada masyarakat
2	Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP	Anggota	Manajemen Publik	Menyusun modul pengabdian kepada masyarakat
3	Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.	Anggota	Kebijakan Publik	Menyusun analisis kebijakan terkait BPD
4.	Dr. Ria Ariany, M.Si	Anggota	Manajemen Publik	Menyusun modul pengabdian kepada masyarakat
5	Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA	Anggota	Administrasi Pembangunan	Memeriksa konsep pengabdian kepada masyarakat berdasarkan data dan informasi terkait
6	Misnar Sitriwanti,S.AP.,M.Si	Anggota	Kebijakan Publik	Monitoring pelaksanaan anggaran pengabdian kepada masyarakat
7	Riki Tanjung	Anggota	Administrasi Pembangunan	Membuat laporan pengabdian

BAB 5 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN

5.1. Realisasi Kegiatan

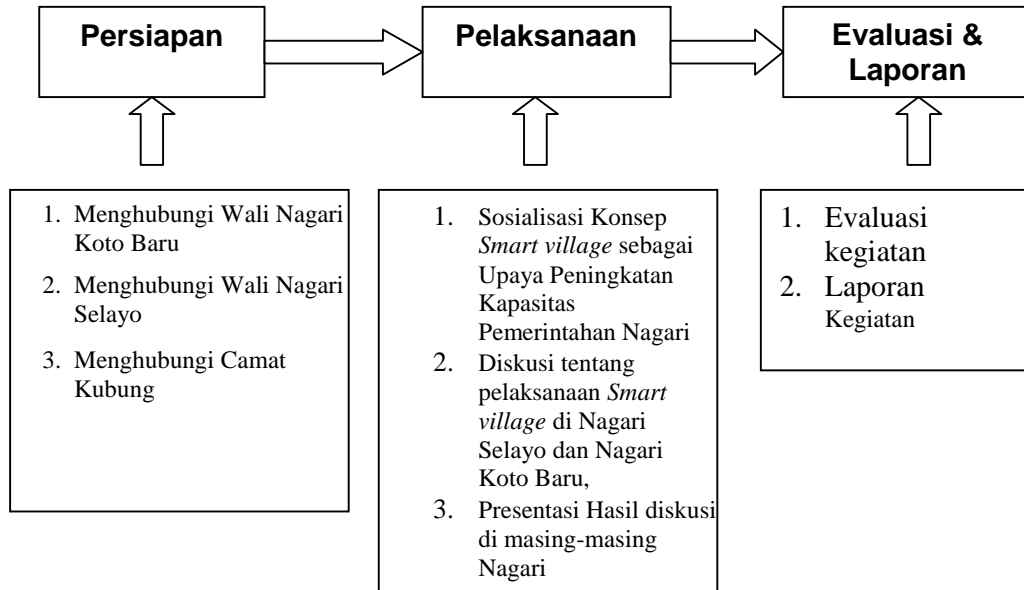
Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 dengan susunan acara sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Pemateri	Keterangan
Rabu/ 12 Desember 2019	09.30 - 10.00	Registrasi Peserta		Panitia
	10.00 -10.30	Pembukaan	M. Ichsan Kabullah, SIP, MPA	
		1. Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an	Masda Ridho	Tim Pengabdian
		2. Sambutan dari Ketua Tim Pengabdian	Kusdarini, SIP, MPA	Tim Pengabdian
		3. Sambutan dari Camat Kubung yang diwakili Sekretaris Camat	Drs. Zamzami	
		4. Pembacaan Doa	Masda Ridho	Tim Pengabdian
	10.30 - 10.45	<i>Coffee break</i>		
	10.45 - 11.45	<i>Smart village</i> : Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari	Drs. Syafrizal, MM	Narasumber
	11.45 - 12.30	Diskusi Secara Berkelompok	Tim Pendamping	Tim Pengabdian
	12.30- 13.30	ISHOMA		
	13.30 – 14.30	Presentasi Hasil Masing-masing Nagari	Peserta dan Tim Pendamping	
	14.30-15.00	Penyerahan Cindera mata Kepada Mitra	Tim Pengabdian	1. Camat Kubung 2. Wali Nagari Koto Baru 3. Wali Nagari Salayo
		Penutupan Acara		

Dalam Kegiatan Pengabdian ini, dihadiri oleh 40 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Nagari Salayo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung dan Pemerhati Pemberdayaan Nagari.

Pelaksanaan pelatihan ini terdiri dari 3 tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Masing-masing tahap, meliputi kegiatan seperti dalam bagan 1 di bawah ini:

Bagan 5.1.
Perencanaan Kegiatan



5.2. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program Pelatihan

Mitra mempunyai partisipasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Secara rinci keterlibatan mitra seperti Tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1.
Partisipasi Mitra

Tahap Kegiatan	Partisipasi
Persiapan	Pendaftaran untuk mengikuti Kegiatan Pengabdian
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dengan materi yang telah disiapkan tim. 2. Keaktifan dalam mengemukakan permasalahan yang dihadapi 3. Mendiskusikan permasalahan yang ada di Nagari
Evaluasi dan Laporan	

5.3. Problem Solving

Mengapa Undang-undang Desa itu Penting ? Karena permasalahan pembangunan diperdesaan sebagian besar merupakan permasalahan dibidang ekonomi, diantaranya :

1. Ketimpangan
2. Kemiskinan
3. Urbanisasi

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu komitmen tinggi dalam penganggaran desa, makanya dibentuk Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Provinsi Sumatera Barat terdapat desa dan terdapat juga nagari, jumlah desa di Provinsi Sumatera Barat sejumlah 120 desa, 808 nagari. Jadi totalnya ada 928 desa dan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten Solok tersebar sebanyak 74 nagari. Agar lebih kuat, pemerintah mengupayakan di desa itu ada bantuan keuangan desa dan pendamping desa. Hasil penggunaan Dana Desa 4 (empat) Tahun terakhir diantaranya digunakan untuk :

1. Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Pada Tahun 2019 masing-masing desa di Provinsi Sumatera Barat menerima Dana Desa sebanyak Rp. 1.004.000.000,-. Untuk pemanfaatan Dana Desa sebenarnya jangan hanya dimanfaatkan untuk fisik saja, harus dirubah *mindset* agar Dana Desa itu

tidak hanya untuk fisik saja, tapi juga harus fokus pada pemberdayaan masyarakat juga. Dan itulah pentingnya ada inovasi desa yang prinsip pelaksanaannya adalah :

1. Kolaboratif
2. Transparan
3. Keberlanjutan
4. Partisipatif
5. Kesetaraan dan keadilan gender

Selain itu, pemanfaatan Dana Desa juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dengan dituntut nya desa melakukan inovasi agar melahirkan *smart government* pada *smart village* yang transparan serta dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk :

1. Meningkatkan kreativitas dan inovasi serta motivasi wali nagari/kepala desa
2. Mengevaluasi, menilai dan mendorong bupati/walikota untuk mengoptimalkan Dana Desa
3. Sebagai apresiasi terhadap wali nagari/kepala desa atas pengelolaan dana desa

Dengan adanya *smart government* pada *smart village* diharapkan :

1. Pemerintah nagari/desa yang pelaksanaannya sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di desa (hasil musrenbang)
2. Pelaksanaan kegiatan di desa dilakukan transparan dan selalu ada pembinaan dari bupati dan wali kota
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap nagari
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari/desa akan meningkat
5. Kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa/nagari akan tercipta.

Maka harapan atau cita-cita yang diharapkan adalah akan tercipta nagari/desa yang mandiri dan akuntabel.

5.4. Akselerasi Pemerintah Nagari Menuju *Smart village*

Bahasan sebelumnya telah melihat bahwa dalam secara umum organisasi, terdapat tiga sudut pandang dalam memahami organisasi yakni; (1) organisasi sebagai wadah, (2) organisasi sebagai proses, dan (3) organisasi sebagai suatu sistem perilaku. Meskipun pandangan ini banyak digunakan ahli, dalam perkembangannya organisasi

seringkali dituntut adaptif dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, organisasi dan lingkungan mencerminkan interaksi antar individu dalam pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian, mutlak dibutuhkan bagi setiap organisasi, termasuk ditingkatan terendah seperti pemerintah nagari untuk mengidentifikasi apa tujuan organisasi yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakatnya.

Seringkali publik luput memahami bahwa organisasi dalam suatu sistem yang baik adalah organisasi yang tahu tujuannya, tahu lingkungan untuk pengembangan selanjutnya, dan dapat memprediksi keuntungan dan kerugian yang akan terjadi dengan berlandaskan pada data informasi tentang lingkungannya. Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, merefleksikan pertemuan tujuan individu yang besar dengan tujuan kolektif semua anggota dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, kerap ditemui satu kesatuan kelompok kerja dalam organisasi yang membuat perencanaan, implementasi sampai mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi. Dengan beorganisasi akan meringankan, mengefektifkan, mengefisienkan, dan mengoptimalkan, pencapaian tujuan yang hendak dicapai bersama dengan cara kerja bersama-sama.

Dengan demikian, maka tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu, dengan organisasi tujuan tersebut kemungkinan besar dapat tercapai. Hal ini dapat berjalan efektif apabila tiap-tiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut sadar akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diembannya untuk mencapai tujuan yang sama yang telah dirumuskan melalui musyawarah.

Organisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan, sekaligus juga dapat menjadi bumerang manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak tahu-menahu tentang organisasi. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya para pemangku kebijakan atau organisatoris memahami pengertian, hakikat, pola dasar organisasi, tujuan organisasi, dan struktur organisasi dalam kerangka pikiran yang jelas dan tegas. Organisasi dapat dijadikan sebagai wadah aktivitas, sebagai proses, sebagai sistem perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Hesselbein, Golsmith dan Beekhard menjelaskan bahwa perubahan lingkungan harus diantisipasi dengan pengambilan berbagai langkah-langkah strategis, diantaranya peningkatan terhadap proses pelayanan,

Berangkat dari hal tersebut, maka tujuan organisasi pada hari ini sesungguhnya sangat relevan dengan penjelasan diatas yakni meningkatkan pelayanan. Pemerintah

nagari sebagai organisasi publik memiliki kekhasannya sendiri dimana tugas kesehariannya adalah tidak hanya berupaya menghadirkan pelayanan yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari tetapi juga memastikan pelayanan publik bisa diakses oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali mengingat pemerintah nagari adalah ujung tombak pelayanan pemerintah. Apalagi berdasarkan regulasi yang ada seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah desa atau nagari mendapat legitimasi yang kuat untuk menjalankan kewenangan penyelenggaraan layanan pemerintah.

Akan tetapi seringkali muncul momok ditengah masyarakat bahwa berurusan dengan pemerintah nagari adalah hal yang menyia-nyiakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Adanya ungkapan “jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah” menjadi pameo yang diketahui masyarakat luas.

Menjawab hal tersebut, dalam upaya mendorong pelayanan yang lebih dekat antara masyarakat dengan pemerintah, Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo sebenarnya telah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai langkah. Pemerintah di kedua nagari tersebut sangat memahami bahwa dalam menghadapi perubahan lingkungan yang selalu dinamis, organisasi harus selalu mengambil langkah-langkah strategis yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tetap eksis di dalam lingkungan yang penuh persaingan. Dalam praktiknya baik Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo telah berupaya meningkatkan kinerja kerja organisasi melalui berbagai kegiatan.

Pertama, peningkatan profesionalitas pegawai. Masalah penting dan sangat mendasar bagi setiap organisasi agar dapat menyiasati perubahan yang cepat berkembang kala ini amat tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari sikap serta perilaku pegawai apakah ianya secara positif dan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi dengan baik. Pengelompokan dalam pembagian tugas dalam bekerja melalui unit-unit kerja dalam organisasi didasarkan kepada spesialisasi yang seharusnya ditunjang serta didukung oleh tenaga profesional yang handal dan berkemampuan memadai. Hal ini tentunya dengan adanya perencanaan awal serta kemauan pihak yang berkompeten untuk mengadakan profesionalisme pegawai. Menurut Balu dan Meyer (1981:155), bahwa :

“Suatu organisasi agar dapat bekerja secara efisien maka setiap orang dari anggota dalam lingkungan organisasi itu harus mempunyai kecakapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya”.

Menurut pakar di atas terlihat sangat jelas pentingnya keberadaan anggota organisasi baik berupa karyawan maupun pimpinannya yang memiliki kecakapan dan kemampuan serta trampil dalam setiap bidang tugas yang dilaksanakannya sehari-hari demi tercapainya kinerja yang optimal sesuai dengan misi organisasi.

Dalam konteks Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo, profesionalisme pegawai sebagai sikap dan prilaku pegawai yang mampu dan handal serta berpengetahuan luas dalam bidangnya telah mampu ditunjukkan dengan kecakapan mereka untuk melakukan pekerjaannya dalam melayani masyarakat banyak sesuai dengan bidang yang digelutinya. Saat ini, Sekretariat baik di Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo telah banyak diisi oleh pegawai yang sudah terlatih dan berpengalaman. Hal ini dikarenakan proses rekrutmen awal atau penerimaan telah melalui serangkaian ujian yang baik. Apalagi mereka yang duduk di pemerintah nagari adalah orang yang telah lolos dari ratusan pelamar mengingat kedua nagari ini adalah nagari yang digolongkan sebagai nagari maju sehingga banyak peminat yang melamar.

Disamping itu, profesionalisme pegawai Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo turut dipengaruhi oleh pembinaan yang maksimal dari Pemerintah Kecamatan Kubung. Sebagai pemerintah yang menaungi kedua nagari ini, Camat Kubung berhasil membuat insentif, pendidikan dan pelatihan serta sistem pembinaan karier yang terencana dengan baik.

Dengan adanya profesionalisme pegawai diharapkan tugas dan fungsi organisasi dapat tercapai tujuannya sesuai dengan misi secara optimal menurut standar tertentu yang telah diharapkan oleh organisasi itu sendiri maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat banyak yang sangat mendambakan pelayanan yang baik dan prima dari pemerintah agar tercipta *good governance*.

Kedua, membuat struktur organisasi yang ramping. Struktur Organisasi juga merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing-masingnya serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta

tanggungjawab masing-masing berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang ada akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antar bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi. Dengan demikian cukup dapat dimaklumi bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang penting adanya dalam perkembangan suatu organisasi untuk pertumbuhan ke arah kemajuan yang pesat untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, di mana akan menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Pada dasarnya, struktur membantu untuk mengatur pola dan pembagian pekerjaan dalam suatu organisasi baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Menurut Steers (1977:70), bahwa :

“Struktur menyatakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas”.

Dari pendapat pakar di atas dapat diketahui bahwa untuk menentukan struktur dengan baik tentunya dengan jalan mengembangkan struktur yang mengarah kepada pemberian keleluasaan kepada pegawai untuk dapat mengembangkan daya inovasi dengan mengacu ke arah responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayaninya sehari-hari. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada para pegawai agar bekerja lebih menggunakan daya kreativitas yang tinggi dengan kebebasan yang bertanggungjawab.

Pada kasus yang terjadi di Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo sendiri, struktur pemerintahan nagari dibuat ramping dimana sekretariat diisi sebanyak sepuluh sampai lima belas orang. Jumlah ini masih tergolong ramping mengingat pada beberapa kasus, masih banyak ditemukan pemerintah desa yang memiliki jumlah anggota lebih dari dua puluh orang. Sedikitnya jumlah pegawai yang menangani pelayanan di Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo karena masing-masing nagari tersebut telah menggunakan teknologi dalam pelayanan.

Ketiga, kegiatan berbasis perencanaan yang matang. Sebagaimana yang dimandatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa atau nagari diamanatkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan menahan laju urbanisasi. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri telah

menganggarkan program/ kegiatan yang cukup besar bagi pemerintah nagari. Tercatat dari kurun waktu 2015 sampai 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan sampai Rp. 3,35 Triliun (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Provinsi Sumatera Barat, 2019). Di tahun 2019, setiap nagari rata-rata menerima kurang lebih Rp. 1,04 Milyar Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Provinsi Sumatera Barat, 2019). Dengan jumlah anggaran yang besar tersebut, Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo dituntut memiliki rencana kerja yang jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Hal yang menarik dilapangan adalah sebagian besar anggaran Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo dialokasikan untuk sektor pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat berbeda jauh dengan fenomena mayoritas desa atau nagari yang masih memfokuskan belanja pada sektor infrastruktur. Besarnya anggaran untuk sektor pemberdayaan dikarenakan Nagari Kotobaru dan Nagari Selayo telah diklasifikasikan sebagai nagari maju. Untuk itu, ruang fiskal pemerintah kedua nagari tersebut sesungguhnya cukup besar untuk membuat kegiatan yang inovatif seperti pelayanan berbasis elektronik.

Pemanfaatan layanan pemerintah nagari berbasis elektronik bukanlah hal yang sukar dilakukan ditengah zaman disrupsi teknologi saat ini. Untuk itu, Pemerintah Nagari Kotobaru dan Pemerintah Nagari Selayo telah mencoba mendorong layanan berbasis elektronik dengan mempelajari *best practice* yang ada di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang pada Desember 2019. Dari studi banding yang dilakukan, perangkat Pemerintahan Nagari Kotobaru dan Pemerintahan Nagari Selayo telah bersepakat untuk membuat layanan berbasis elektronik pada tahun 2020. Hal yang masih menjadi kendala adalah minimnya tenaga IT untuk melakukan *maintenance* apabila ditemukan gangguan dilapangan.

Hal lain yang menjadi salah satu kebanggaan Nagari Selayo adalah Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengajukan Nagari Selayo, Kecamatan Kubung menjadi salah satu Kampung Wisata Budaya setelah sebelumnya berhasil mengorbitkan Nagari Jawi-Jawi Guguak sebagai Kampung Budaya. Pengajuan kampung wisata budaya Nagari Selayo ini akan lebih diarahkan kepada keunggulan adat istiadat, dan usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Selain menonjolkan tatanan adat masyarakat, Nagari Selayo juga memiliki usaha ekonomi kreatif yakni sulam benang merah yang merupakan motif sulam khas

daerah itu, dan kini cukup berkembang. Nagari Selayo juga memiliki situs sejarah dan budaya yang erat kaitannya dengan sejarah perjalanan daerah seperti makam Datuk Parpatih Nan Sabatang. Dari sejumlah potensi yang sudah didata Dinas Pariwisata, nantinya akan dipilih mana yang bisa diadopsi sesuai potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal masyarakat di Nagari Selayo, baru kemudian dikembangkan.

Langkah ini akan menjadi salah satu poin penting dalam pengembangan kapasitas pemerintah nagari khususnya Pemerintah Nagari Selayo dalam mencapai perwujudan *smart village* di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada realita bahwa nagari/desa juga menjadi tumpuan pembangunan nasional, dan keberhasilan desa secara akumulatif akan mendorong kelangsungan ekonomi nasional maka posisi nagari/desa menjadi sungguh sangat penting. Nagari/Desa perlu dikembangkan secara inovatif menuju desa cerdas atau *smart village*.

Untuk mencapai *smart village*, dibutuhkan usaha yang lebih besar dengan peningkatan dan pengembangan nagari/desa, ketersediaan infrastruktur yang ada, serta kecukupan resources yang memadai. Selain itu, dalam upaya mewujudkan *smart village* ini harus didukung dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat dan juga lembaga terkait untuk mewujudkan *smart institution, smart infrastructure, smart service delivery, smart technology and innovation*, serta *smart societies*. Untuk memenuhi seluruh komponen tersebut, diperlukan dukungan seluruh ekosistem *smart village* yang berpengaruh. Puluhan organisasi perlu untuk berkolaborasi lintas industri/ sektor untuk membangun sebuah *smart village*. Ini termasuk melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas teknologi, pemerintah daerah, litbang akademik, organisasi sosial, perusahaan besar dan kecil, petani, buruh, dll. Banyak dari organisasi ini berada di luar ekosistem desa, namun relatif cukup memiliki pengaruh untuk terlibat dalam program *smart village*.

Membangun *smart village* atau nagari cerdas tidak hanya semata-mata terbatas pada kecanggihan ICT (Information Communication and Technology) saja, tetapi yang lebih utama dan perlu ditekankan adalah bagaimana konsep *smart village* ini bisa mengubah kapasitas masyarakatnya dan cara mereka berinteraksi. Menciptakan kesadaran di antara warga desa tentang pentingnya inovasi dalam usaha mikro dan kecil untuk menciptakan kewirausahaan adalah hal penting.

Smart village atau kampung cerdas akan mendesain nagari/desa sebagai pusat kreativitas warga yang menggabungkan antara kegiatan ekonomi produktif dan kreatif, peningkatan pendidikan dan kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan, dengan instrumen ICT sebagai pendorongnya. Contohnya penunjukan Nagari Salayo sebagai Kampung Wisata. Dengan penerapan konsep *smart village* ini, peran pemerintah nagari lebih dioptimalkan agar dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh nagari dapat dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

6.2. Saran

Untuk mewujudkan *smart village* perlu dilakukan:

1. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program menuju *smart village*.
2. Kesiapan seluruh lembaga atau perangkat yang ada di Pemerintahan Nagari dan lembaga terkait lainnya.
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
5. Dukungan stakeholder yang terkait
6. Dukungan kecanggihan ICT (Information Communication and Technology)

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Rosita.Novi dan Susy Ella. 2019. *Pengembangan model smart rural untuk pembangunan Kawasan Perdesaan di Indonesia..* Jurnal Borneo administrator Vol I (15) p. 41-58
- Giffinger,R.,Fertner C.,Kramar.,H.,Kalasek.,R. Natasa.,P.-M.,and Meijers,E. 2007. *Smart cities:Rangling of European medium-sized cities.*October, [https://doi.org/10.1016/s0921-503\(00\)00781-4](https://doi.org/10.1016/s0921-503(00)00781-4)
- Supangkat. 2015. *Pengenalan dan Pengembangan Smart City.* Bandung:e-Indonesia Initiatives.Intitute Teknologi Bandung
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa.

FOTO DOKUMENTASI









LOGBOOK KEGIATAN PENGABDIAN IbDM Kusdarini 2019
Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Judul : Smart Village: Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari

Dana :: 10,000,000

- TIM
1. Kusdarini, SIP, MPA (Ketua)
 2. Dr. Ria Ariany, M.Si
 3. Dr. Hendri Koeswara, Sip, M.Soc.Sc
 4. Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP
 5. M. Ichsan Kabullah, SIP, MPA
 6. Misnar Sitriwanti, SAP, M.Si
 7. Engdila Putri
 8. Riki Tanjung

NO	URAIAN	KETERANGAN TANGGAL
1	Rapat Tim Pengabdian IbDM dengan Judul Smart Village: Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari	2 Oktober 2019
2	fotocopy bahan rapat tim pengabdian ()	4 Oktober 2019
3	Pembelian ATK	4 Oktober 2019
4	Rapat Tim Pengabdian IbDM dengan Judul Smart Village: Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari	11 Oktober 2019
5	Rental Mobil (observasi tahap 1)	17 Oktober 2019
6	Beli bensin	17 Oktober 2019
7	Makan siang tim observasi	17 Oktober 2019
8	Rapat Tim Pengabdian IbDM dengan Judul Smart Village: Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari	13 November 2019
9	Rental Mobil (observasi tahap 2)	11 Desember 2019
10	Beli bensin	11 Desember 2019
11	Makan siang tim observasi	11 Desember 2019
12	Cetak Spanduk	13 Desember 2019
13	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Kecamatan Kubung	12 Desember 2019
14	Publikasi ke media massa	13 Desember 2019
15	Pembuatan Laporan+copy+jilid	15 Desember 2019